Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Ketentuan Adanya Ancaman Atau Paksaan Sebagai Dasar
Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0468/Pdt.G/2014/PA. Trk)
AMARENDRA S, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP KETENTUAN ADANYA ANCAMAN ATAU PAKSAAN SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0468/PDT.G/2014/PA.TRK)

Oleh

Amarendra Syantikaratna[1] dan Ninik Darmini[2]

INTISARI

Penulisan Tesis ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap ketentuan adanya ancaman atau paksaan sebagai dasar penolakan permohonan pembatalan perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0468/PDT.G/2014/PA.Trk) dan untuk mengetahui implikasi hukum atas penolakan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan yang telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Agama No. 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk terhadap hak dan kewajiban pihak Pemohon dan Termohon.

Adapun penelitian dilakukan dengan jenis penelitian normatif dan dikaji menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif dengan cara memberi gambaran, mengkaji, menelaah, dan menjelaskan kaitan yang ada dalam penelitian tesis. Penelitian kepustakaan ini kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian tentang interpretasi hakim Pengadilan Agama terhadap ketentuan adanya ancaman atau paksaan sebagai dasar penolakan permohonan pembatalan perkawinan adalah dalam lingkup ancaman fisik bukan verbal atau lisan. Hal mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pasca Putusan Pengadilan Agama No. 0468/Pdt.G/2014/PA.Trk. tidak mengubah status ataupun hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah karena permohonan pembatalan perkawinannya tidak dikabulkan oleh Hakim.

Kata kunci: Paksaan, Pembatalan perkawinan, Perkawinan, Hak dan kewajiban Suami Isteri

[1] Tirtonirmolo, Jl. Jomegatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
[2] Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Ketentuan Adanya Ancaman Atau Paksaan Sebagai Dasar
Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0468/Pdt.G/2014/PA. Trk)
AMARENDRA S, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTERPRETATION OF RELIGIOUS COURT JUDGES ON THE PROVISION OF THREATS OR COERCION AS THE BASIS FOR REFUSING APPLICATION MARITAL CANCELLATIONS

(Study of Religious Court Decision No. 0468 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk)

By

Amarendra Syantikaratna[3] And Ninik Darmini[4]

ABSTRACT

The case of a request for marriage annulment examined through a copy of the Tarakan Religious Court Decision No. 0468 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk. The following thesis aims to study and analyze that interpretations Religious Court Judges on the provision of threats or coercion as the basis for refusing applications for marital cancellations and to understand the effects arising from such request in regards of the rights and obligations of the plaintiff and the defendant (husband and wife).

The research was carried out using normative research and studied based on secondary data. The secondary data used in this study consisted of research material in form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The thesis research is a descriptive ones, using overview, review, analysis and explanation of occurences that exist in the thesis research. The library research was then analyzed using qualitative analysis.

The results of this thesis research note that interpretations Tarakan Religious Court Judges on the provision of threats or coercion as the basis for refusing applications for marital cancellations within the scope of physical threats rather than verbal. In regards of the rights and obligations of the plaintiff and the defendant, the Decision of the Religion Court No. 0468 / Pdt.G / 2014 / PA.Trk, ruled that there will be no change in legal status, rights and obligations of both as rightful husband and wife.

Keyword: Compulsion, Marriage Annulment, Marriage, Rights and Obligations of Wife

[3] Tirtonirmolo, Jl. Jomegatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
[4] Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada